

LAPORAN TAHUNAN

PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS IB

TAHUN 2017



JALAN CENDRAWASIH NO. 2 PEKALONGAN

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat dan Karunia-Nya, Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena Laporan Tahunan Kegiatan Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Tahun 2017 telah selesai disusun. Maksud dan tujuan dari laporan ini sebagai hasil akhir dari aktualisasi program Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB selama tahun 2017

Dengan adanya penyusunan laporan ini, diharapkan bisa memberikan informasi mengenai kinerja dari Aparatur Sipil Negara Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB beserta fasilitas-fasilitas sebagai alat bantu dalam memperlancar proses kerja di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB.

Demikian Laporan Tahunan Kegiatan Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB tahun 2017, semoga dengan adanya laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta dapat mendorong agar menjadi lebih optimal dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di bidang hukum, sehingga dapat terwujud tegaknya supremasi hukum dan keadilan di Wilayah hukum Kota dan Kabupaten Pekalongan khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Pekalongan, 2 Januari 2018

**KETUA PENGADILAN NEGERI
PEKALONGAN KELAS IB**

**SARWONO,SH.,M.Hum
NIP. 1958102511982011002**

DAFTAR ISI

KataPengantar.....	I
Daftar isi	II
Bab I Pendahuluan	2
Bab II A. Struktur Organisasi	6
- Standar Operasional Prosedur (SOP).....	7
- Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).....	9
B. Pelayanan Publik yang Prima	10
- Akreditasi Penjaminan Mutu	10
- Posbakum	10
- Sidang Keliling / pelayanan terpadu.....	11
- Perkara Prodeo.....	11
Bab III Pembinaan dan Pengelolaan.....	12
A. Sumber Daya Manusia	12
- Mutasi	14
- Promosi.....	15
- Pensiun	15
- Diklat.....	16
B. Penyelesaian Perkara.....	16
- Jumlah sisa perkara yang diputus	16
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	17
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan PK.....	17
- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi	18
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi.....	18

	C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	19
	D. Pengelolaan Keuangan	22
	E. Dukungan Teknologi Informasi terkait SIPP	24
	- Publikasi perkara (one day one publish)	
	F. Regulasi Tahun 2017	25
Bab	IV Pengawasan.....	27
	A. Internal	27
	B. Evaluasi	29
Bab	V Penutup	
	A. Kesimpulan	30
	B. Saran.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB sebagai Peradilan Tingkat Pertama yang dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut dalam pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya dibawah naungan dan bimbingan serta pengawasan Mahkamah Agung R.I berkewajiban melaksanakan amanat yang digariskan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang yang mengacu pada arah kebijaksanaan hukum dan Garis Besar Haluan Negara.

Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB sebagai pelaku pelaksana kekuasaan kehakiman di daerah dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh kekuasaan lainnya, sehingga cita-cita Negara hukum yang menjamin penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dapat terwujud.

Dalam menjalankan suatu organisasi yang baik, terlebih dahulu ditentukan apa yang akan menjadi visi suatu organisasi. Untuk mencapai visi tersebut harus menentukan beberapa misi yang merupakan pernyataan untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung RI, maka dalam merumuskan visi dan misi tersebut, Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB senantiasa menyelaraskan visi dan misi Mahkamah Agung RI yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, dengan misi menjaga kemandirian Badan Peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, meningkatkan kredibilitas dan transparansi.

Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut dilandasi dengan Visi dan Misi yaitu :

Visi:

Terwujudnya Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB yang Agung

Misi:

- 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan***
- 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang hukum dan keadilan di Kota dan Kabupaten Pekalongan***

3. *Meningkatkan kualitas aparatur Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB yang profesional, bersih, berwibawa dan berakhlakkarimah*
4. *Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen peradilan*
5. *Meningkatkan pengawasan internal yang efektif dan efisien*
6. *Meningkatkan sarana dan prasarana*

Seiring dengan langkah-langkah kebijakan Mahkamah Agung R.I, di tahun 2017 Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB telah melaksanakan upaya-upaya :

1. Peningkatan Kinerja Dalam Penegakan Hukum;

Dalam rangka peningkatan kinerja dalam penegakan hukum ini Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB dalam tahun 2017 berusaha untuk mengikut sertakan Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Juru Sita/Juru Sita Pengganti dan Staf dalam kegiatan-kegiatan Pendidikan/Pelatihan, Sosialisasi dan Work shop baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi maupun oleh Badan/Lembaga lainnya. Hal ini guna menambah wawasan agar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dapat lebih baik lagi.

- a. **Penyelesaian perkara;**

Untuk perkara yang masuk tetap berupaya penyelesaiannya dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. Dalam mewujudkan hal tersebut Ketua Pengadilan dengan dibantu oleh Panitera dan Sekretaris secara berkala mengadakan bimbingan kepada para Hakim serta secara berkala juga diadakan rapat bulanan evaluasi perkara untuk membahas penyelesaian perkara yang diikuti oleh Hakim, Panitera Pengganti, Pejabat Fungsional. Sedangkan untuk rapat dinas diadakan juga secara rutin bulanan yang diikuti oleh seluruh pegawai Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB. Selain itu untuk meningkatkan kinerja Panitera Pengganti dalam penyelesaian perkara, Panitera memberikan penghargaan kepada Panitera Pengganti yang dapat menyelesaikan perkara (minutasi) dengan cepat, hal ini bertujuan untuk memacu semangat Panitera Pengganti dalam menyelesaikan perkara.

- b. **Pemenuhan Sarana dan Prasarana;**

- i. Kendaraan Dinas roda 4 (empat):

Untuk saat ini kendaraan roda 4 di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB berjumlah 4 (empat), dengan perincian 2 (dua) unit milik Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB dan 2 (dua) unit bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

ii. Kendaraan Dinas Roda 2 (dua);

Di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB untuk tahun 2017 tidak ada penambahan kendaraan bermotor. Untuk saat ini Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB memiliki 6 unit motor namun 1 (satu) unit dalam keadaan rusak berat, maka untuk mendukung kelancaran tugas diharapkan adanya penambahan kendaraan dinas roda dua terutama untuk Pejabat Struktural yang tugasnya berhubungan dengan instansi lain serta untuk para Jurusita guna pelaksanaan tugas pemanggilan pihak-pihak yang berperkara dan pemberitahuan putusan tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi/peninjauan kembali/grasi.

iii. Gedung, Bangunan dan Rumah Dinas ;

Jumlah rumah dinas sebanyak 17 (tujuh belas) unit dengan kondisi 8 (delapan) unit ditempati oleh Hakim dan Pegawai dan 9 (sebelas) unit kosong dengan kondisi rusak berat dan perlu dilakukan perbaikan/Rehab. Rumah Dinas untuk Ketua dalam kondisi rusak berat dan tidak layak untuk ditempati sehingga masih perlu perbaikan

iv. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran ;

Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB tahun 2017 ada pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dengan rincian sebagai berikut :

- Peralatan dan Fasilitas Pendukung Perkantoran :

1. Lemari Arsip Ruang Umum dan Keuangan	2 Unit
2. Mesin Absensi	1 Unit
3. Kursi besi untuk Pengunjung	5 M2
4. Kursi Kerja PP	15 Unit
5. AC Split	5 Unit
6. UPS (Uninterrupted Power Supply)	2 Unit
7. PC Unit / Komputer	6 Unit
8. Laptop	1 Unit
9. Printer	3 Unit
10. Scanner	1 Unit

v. Alat Pengolah Data ;

Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB untuk tahun 2017 ada pengadaan dan penambahan alat pengolah data dan komunikasi dengan rincian sebagai berikut :

- Alat Pengolah data pendukung Kesekretariatan :
 1. Personal Computer (PC) 2 Unit
 2. Printer 1 Unit
 3. Finger Scan 1 Unit

- Pengolah data dan komunikasi Pendukung SIPP :
 1. Laptop 1 Unit
 2. Personal Computer (PC) 4 Unit
 3. Printer 2 Unit
 4. Scanner 1 Unit
 5. UPS 2 Unit

c. Pelayanan pada masyarakat.

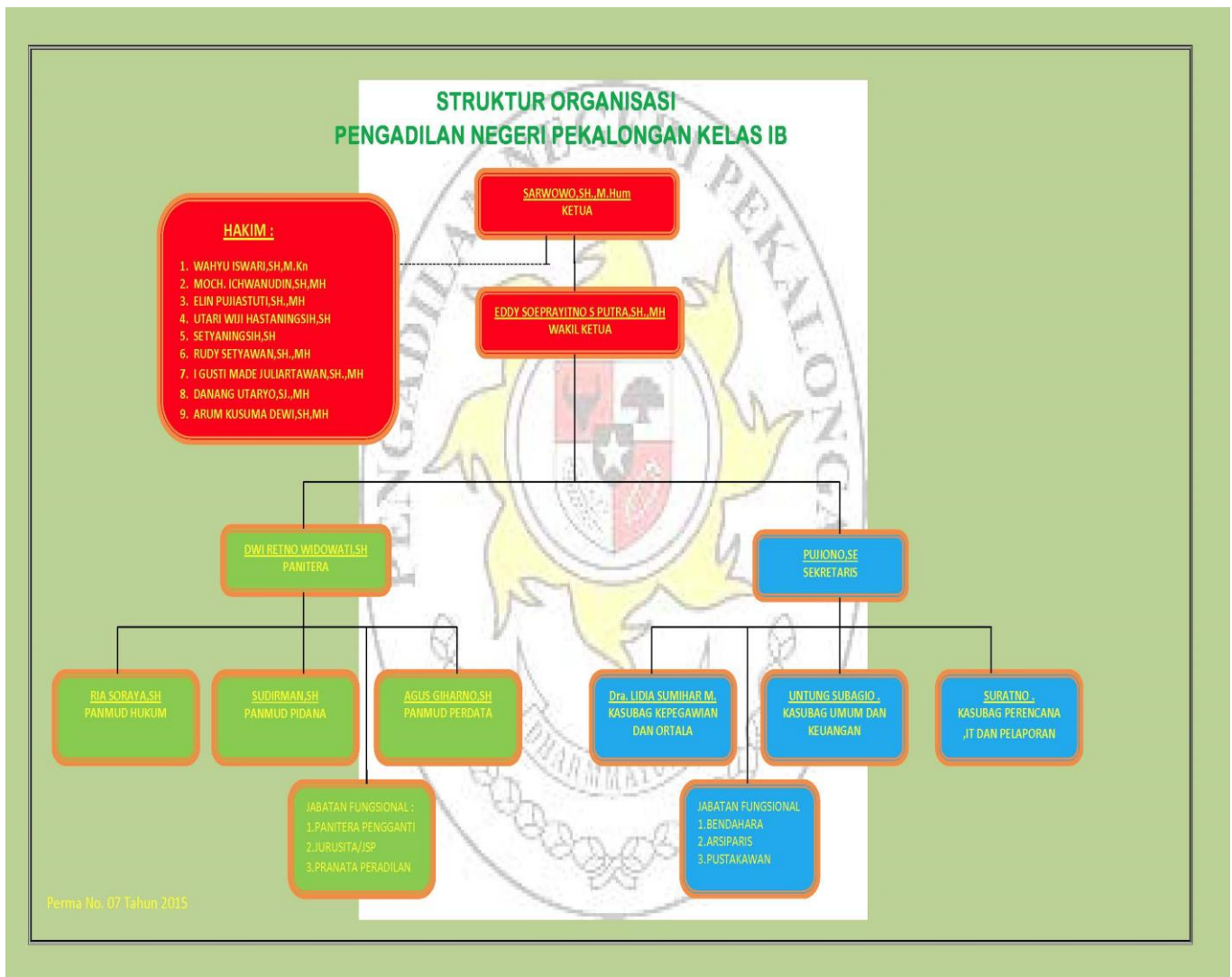
Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan, Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB telah menggunakan sistem loket yaitu di Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Hukum, sedangkan untuk biaya panjar perkara dibayarkan melalui BRI Cabang Pekalongan.

BAB II

A. Struktur Organisasi

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum ke Mahkamah Agung RI, maka terhitung sejak tanggal 31 Maret 2004 Pembinaan Organisasi, Administrasi dan Finansial Peradilan dialihkan ke Mahkamah Agung RI.

Dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan antara lain adanya pembagian tugas sebagai berikut :



- Standar Operasional Prosedur (SOP)

No	Unit Kerja	Jumlah	Terdiri dari	Keterangan
I	Teknis Pengadilan Negeri Pekalongan			
1	Ketua	0		
2	Wakil Ketua	0		
3	Hakim	0		
4	Panitera	0		
5	Panitera Muda Pidana	16	1.SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Cepat (Tipiring) 2.SOP Penanganan Barang Bukti 3.SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Praperadilan 4.SOP Penetapan Diversi 5.SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak 6.SOP Permohonan Izin/Persetujuan Penggeledahan 7.SOP Permohonan Izin/Persetujuan Penyitaan 8.SOP Penyelesaian Grasi 9.SOP Proses Penyelesaian Upaya Hukum Peninjauan Kembali 10. SOP Proses Penyelesaian Upaya Hukum Kasasi 11. SOP Proses Penyelesaian Upaya Hukum Banding 12.SOP Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Psl 29 KUHAP 13.SOP Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Psl 25 (2) KUHAP 14.SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Lalu lintas 15.SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat 16.SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa	
6	Panitera Muda Perdata	10	1.SOP Perdata Eksekusi Riil 2.SOP Delegasi Panggilan/Pemberitahuan (Dari PN Lain) 3.SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Prodeo 4.SOP Penyelesaian Perkara Perdata Upaya Hukum Peninjauan Kembali 5.SOP Penyelesaian Perkara Perdata	

			<p>Upaya Hukum Kasasi</p> <p>6.SOP Penyelesaian Perkara Perdata</p> <p>Upaya Hukum Banding</p> <p>7.SOP Tata Cara Penyelesaian Keberatan Perkara Gugatan Sederhana</p> <p>8.SOP Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Oleh Hakim Tunggal</p> <p>9.SOP Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan</p> <p>10.SOP Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan</p>	
7	Panitera Muda Hukum	11	<p>1.SOP Surat keluar Kepant.Hukum</p> <p>2.SOP Surat Masuk Kepant.Hukum</p> <p>3.SOP Pemb. Surat Ket.Penelitian</p> <p>4.SOP Pelayanan Informasi</p> <p>5.SOP Penanganan Pengaduan</p> <p>6.SOP Layanan Hukum Pendampingan</p> <p>7.SOP Kerjasama Posbakum</p> <p>8.SOP Pendaft.Surat Kuasa Insidentil</p> <p>9.SOP Pendaftaran Surat Kuasa</p> <p>10.SOP Pendaftaran Badan Hukum</p> <p>11.SOP Laporan Data Perk.Perdata dan Pidana</p>	
8	Panitera Pengganti		<p>1.SOP Panitera Pengganti Perkara Pidana</p> <p>2.SOP Panitera Pengganti Perkara Perdata</p>	
9	Jurusita/JSP	2	<p>1.SOP Jurusita Pemberitahuan</p> <p>2.SOP Jurusita Panggilan</p>	
II	Non Teknis			
1	Sekretaris	0		
2	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	6	<p>1.SOP Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun Berjalan</p> <p>2.SOP Penyusunan Program dan Anggaran Tahun Berikutnya</p> <p>3.SOP Update Konten Website</p> <p>4.SOP Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun Berjalan</p> <p>5.SOP Penyusunan Laporan Kesekretariatan</p> <p>6.SOP</p>	
3	Kasubag Kepegawaian dan ORTALA	10	<p>1.SOP Usulan Jabatan</p> <p>2.SOP Cuti Pegawai</p> <p>3.SOP Usulan Pensiun Hakim dan Pegawai</p> <p>4.SOP Usul Kenaikan Pangkat</p> <p>5.SOP Usul Kenaikan Gaji Berkala</p> <p>6.SOP Pembuatan Surat Keputusan</p>	

			7.SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 8.SOP Bezetting 9.SOP Daftar Urut Senioritas Hakim 10.SOP Surat Masuk dan Surat Keluar Kepegawaian	
4	Kasubag Umum dan Keuangan	8	1.SOP Rekonsiliasi BMN 2.SOP Permohonan Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN 3.SOP Pengelolaan Akuntansi BMN 4.SOP Pengelolaan Barang Persediaan 5.SOP Penghapusan BMN 6.SOP Pengadaan dengan metode seleksi sederhana atau Pengadaan Langsung 7.SOP Surat Keluar Sub Bag. Umum 8.SOP Surat Masuk Sub Bag. Umum	

- Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

No	Sasaran Kerja Pegawai	Jumlah Kegiatan Tahun 2017	Keterangan
	Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB		
I	Teknis		
1	Ketua	21 kegiatan	
2	Wakil Ketua	9 kegiatan	
3	Hakim	4 kegiatan	
4	Panitera	16 kegiatan	
5	Panitera Muda Perdata	10 kegiatan	
6	Panitera Muda Pidana	20 kegiatan	
7	Panitera Muda Hukum	20 kegiatan	
8	Panitera Pengganti	10 kegiatan	
9	Jurusita / JSP	5 kegiatan	
II	Non Teknis		
1	Sekretaris	13 kegiatan	
2	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	10 kegiatan	
3	Kasubag Kepegawaian dan ORTALA	12 kegiatan	
4	Kasubag Umum dan Keuangan	8 kegiatan	

B. Pelayanan Publik Yang Prima

- Akreditasi Penjaminan Mutu

Guna meningkatkan pelayanan public terutama kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB khususnya di bidang informasi, Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB telah membuka situs resmi Pengadilan Negeri Pekalongan yang beralamat <http://www.pn-pekalongan.go.id>. Situs ini merupakan media informasi yang dapat bermanfaat tidak hanya di lingkungan peradilan saja akan tetapi masyarakat secara umum juga bisa memanfaatkannya.

Dalam perkembangannya, situs ini merupakan implementasi dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/ SK/I/2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Salah satu hal yang mendorong diwujudkannya situs ini adalah adanya ekspektasi masyarakat terhadap dunia peradilan yang kian hari semakin meningkat. Masyarakat mengharapkan pengadilan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan serta memberikan pelayanan yang cepat, singkat, sederhana, biaya murah, dan transparan.

Dalam rangka Peningkatan pelayanan public tersebut dan sesuai dengan Kebijakan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB telah melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu dan meraih nilai *A Excellent*.

- Posbakum

Untuk mensukseskan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengalokasikan anggaran melalui DIPA 03 tahun 2017 sejumlah Rp. 71.340.000,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah). Termasuk didalamnya anggaran untuk penyelenggaraan Posbakum sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Hal tersebut oleh Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB telah ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan Posbakum (Pos Bantuan Hukum) dengan bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama dan Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB sebagai *Pihak Pertama* dan Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai *Pihak Kedua*.

- **Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu**

Pelayanan public adalah merupakan salah satu prioritas dalam pelayanan dan pelaksanaan tugas sehari-hari. Sehubungan dengan hal tersebut Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB mengadakan sidang keliling khususnya sidang perkara lalulintas bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota dan Kabupaten Pekalongan atau dengan Polresta Pekalongan maupun Polres Kajan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB.

- **Perkara Prodeo**

Untuk mensukseskan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum disamping penyelenggaraan Posbakum, juga terdapat kegiatan Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara yang didalamnya termasuk **Biaya Penyelesaian Perkara** (Belanja Bahan, Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi, Belanja Jasa Profesi dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota) dan **Biaya Eksekusi**.

Dalam DIPA 03 Tahun 2017 pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk dua perkara.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok perlu adanya pembinaan dan pengelolaan yang tertib dan berkesinambungan. Upaya pembinaan dan pengelolaan meliputi :

A. Sumber Daya Manusia

Data Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	SARWONO, S.H., M.Hum.	Ketua	
2	Eddy Soeprayitno S.Putra, S.H.,M.H.	Wakil Ketua	
3	Moch. Ichwanudin, S.H., M.H,	Hakim	
4	Elin Pujiastuti, S.H., M.H.	Hakim	
5	Utari Wiji Hastaningsih, S.H.	Hakim	
6	Setyaningsih, S.H,	Hakim	
7	Danang Utaryo, S.H., M.H,	Hakim	
8	Rudy Setyawan, S.H.	Hakim	
9	I Gusti Made Juliartawan, S.H.,M.H,	Hakim	
10	Arum Kusumadewi, S.H., M.H.	Hakim	
11	Dwi Retno Widowati	Panitera	
12	Pujiono, S.E	Sekretaris	
13	Nahdulhak, S.H,	Wakil Panitera	Pensiun per 1 Juli 2017
14	Agus Giharno, S.H,	Panmud Perdata	
15	Sudirman, S.H.	Panmud Pidana	
16	Ria Soraya, S.H.	Panmud Hukum	
17	M.C. Ardiwijati, S.H.	Panitera Pengganti	
18	Parjito, S.H	Panitera Pengganti	
19	Sutrisno, S.H.	Panitera Pengganti	
20	Widijanto, S.H,	Panitera Pengganti	
21	Abdul Munir	Panitera Pengganti	
22	Carto	Panitera Pengganti	
23	Farida Hartati	Panitera Pengganti	

24	Nurohman	Panitera Pengganti	
25	Sujarwo	Panitera Pengganti	
26	Muyassaroh, S.H.	Panitera Pengganti	
27	Musyarofah	Panitera Pengganti	
28	Faik Ardani, S.H,	Panitera Pengganti	
29	Sukarna	Jurusita	
30	Eriyati	Jurusita	
31	Ratna Wijayanti	Jurusita	
32	Purwana	Jurusita	
33	Kasidi	Jurusita Pengganti	
34	Agung Prastowo, S.H,	Jurusita Pengganti	
35	Eka Prasetiyawan, S.H.	Jurusita Pengganti	
36	Sari Siti Naomi, S.H,	Jurusita Pengganti	
37	Cristianto	Jurusita Pengganti	
38	Suratno	Kasubag PTIP	
39	Dra. Lidia Sumihar Mayana	Kasubag Kepeg & Ortala	
40	Untung Subagio	Kasubag Umum & Keuangan	
41	Warjanto, S.H.	Staf Pelaksana	Bendahara Pengeluaran
42	Sri Peny Pramuwati	Staf Pelaksana	Operator IT/SIPP

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Secara umum tenaga teknis yudisial yang ada di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB telah dapat menyelesaikan tugas-tugas secara baik tetapi tentunya kemampuan harus terus ditingkatkan guna pencapaian hasil kinerja yang memadai seperti yang diharapkan. Untuk saat ini jumlah tenaga Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB sebanyak 36 orang yang terdiri dari Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti dan Staf Kepaniteraan.

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Sumber Daya Manusia Non Teknis belum memadai khususnya tenaga IT yang hanya berjumlah 1 orang. Namun dalam pembinaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB mengikutkan pelatihan – pelatihan khususnya bagian keuangan untuk SAKPA dan bagian Umum untuk SIMAK BMN baik yang diselenggarakan Mahkamah Agung RI maupun Kementerian Keuangan /KPPN. Untuk saat ini jumlah Tenaga Non Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB sebanyak 5 orang yang terdiri dari Sekretaris, Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan, Kasubag Kepegawaian dan Ortala, Kasubag Umum dan Keuangan, dan staf Kesekretariatan. Tenaga honorer Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB sebanyak 7 orang yang terdiri dari 2 orang (satpam), 3 orang (Tenaga Administrasi), 1 orang (Tenaga Kebersihan), 1 orang (Sopir).

– Mutasi

Daftar Hakim dan Pegawai yang mutasi, baik yang pindah/keluar dari Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB maupun yang datang/masuk ke Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB

No.	Nama	Jabatan Lama	Hasil Mutasi
1.	Sarwono, SH., M.Hum.	Ketua PN Palopo	Ketua PN Pekalongan
2.	Akhmad Rosidin, SH., MH	Ketua PN Pekalongan	Hakim PN Jakarta Selatan
3.	Eddy Soeprayitno S. Putra, SH., MH.	Hakim PN Jakarta Pusat	Wakil Ketua PN Pekalongan
4.	Purnawan Narsongko, SH	Wakil Ketua PN Pekalongan	Ketua PN Cilacap

5.	R. Hendy Nugroho S, SH., MH.	Hakim PN Pekalongan	Wakil Ketua PN Kolaka
6.	Irwin Zaily, SH.	Hakim PN Pekalongan	Wakil Ketua PN Kepahiang
7.	Widiyanto, SH	PP PN Kebumen	PP PN Pekalongan
8.	Rosana Irawati, SH., MH.	Hakim PN Pekalongan	Hakim PN Mataram
7.	I Gusti Made Juliartawan, SH., MH.	Hakim PN Situbondo	Hakim PN Pekalongan
8.	Setyaningsih, SH.	Hakim PN Kraksaan	Hakim PN Pekalongan
9.	Elin Pujiastuti, SH., MH.	Hakim PN Garut	Hakim PN Pekalongan
10.	Utari Wiji Hastaningsih, SH., MH.	Hakim PN Kebumen	Hakim PN Pekalongan.
11.	Indriani, SH. M.Kn.	Hakim PN Pekalongan	Hakim PN Sukoharjo
12.	Rudy Setyawan, SH.	Hakim PN Ponorogo	Hakim PN Pekalongan
13.	Danang Utaryo, SH., MH.	Hakim PN Bangkalan	Hakim PN Pekalongan

– **Promosi**

Daftar Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB yang memperoleh promosi jabatan pada tahun 2017.

No.	Nama Pegawai	Jabatan Lama	Hasil Promosi
1.	Wahyu Iswari, S.H., M.Kn.	Hakim PN Pekalongan	Wakil Ketua PN Prabumulih
2.			

– **Pensiun**

Pada tahun 2017 di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB ada 1 orang pegawai yang masuk masa pensiun yakni Bpk. NAHDULHAK, S.H. terakhir sebagai Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB.

- **Diklat**

- Daftar Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB yang mengikuti Diklat pada tahun 2017.

No.	Nama Pegawai	Jenis Diklat	Keterangan
1.	Eddy Soeprayitno S. Putra, SH., MH.	Sertifikasi Hakim Niaga	26-02-2017 s/d 14-03-2017
2.	Utari	Pelatihan Pemantapan Kode Etik Perilaku Hakim Angkatan IV	06-03-2017 s/d 10-03-2017
3	Elin	Pelatihan Pemantapan Kode Etik Perilaku Hakim Angkatan IV	06-03-2017 s/d 10-03-2017
4	Moch. Ichwanudin, S.H., M.H.	Diklat TIPIKOR	03-04-2017 s/d 19-04-2017
5	Pujiono, S.E	DIKLAT PIM IV	23-08-2017 s/d 20-12-2017

B. Penyelesaian Perkara

- **Jumlah sisa perkara yang diputus**

Keadaan Perkara Perdata

Pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB tahun 2017

No	Nama	Perkara Masuk	Perkara Yang diputus	Sisa Perkara	Keterangan
1	Gugatan	79	65	14	
2	Permohonan	133	132	1	

Keadaan Perkara Pidana

Pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB tahun 2017

No	Nama	Perkara Masuk	Perkara Yang diputus	Sisa Perkara	Keterangan
1	Pidana Biasa	365	319	46	
2	Pidana Anak	14	14	0	
3	Pidana Singkat	0	0	0	
4	Cepat	269	269	0	
5	Lalu Lintas	57.715	57.715	0	

- **Jumlah perkara yang diputus tepat waktu**

Rekapitulasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB

tahun 2017 yang diputus tepat waktu :

No	Nama	Perkara Masuk	Perkara Yang diputus	Sisa Perkara	Keterangan
1	Gugatan	79	65	14	
2	Permohonan	133	132	1	

Rekapitulasi Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB

tahun 2017 yang masuk, putus dan sisa belum diputus :

No	Nama	Perkara Masuk	Perkara Yang diputus	Sisa Perkara	Keterangan
1	Pidana Biasa	365	319	46	
2	Pidana Anak	14	14	0	
3	Pidana Singkat	0	0	0	
4	Cepat	269	269	0	
5	Lalu Lintas	57.715	57.715	0	

- **Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK :**

- **Banding**

a. Putusan Perdata Tk.I yang tidak mengajukan Banding sebanyak 60 Perkara;

b. Putusan Pidana Tk.I yang tidak mengajukan Banding sebanyak 315 Perkara;

- **Kasasi**

a. Putusan Perdata Tk.I yang tidak mengajukan Kasasi sebanyak 77 perkara

b. Putusan Pidana Tk.I yang tidak mengajukan Kasasi sebanyak 316 perkara

- **Peninjauan Kembali (PK)**

a. Putusan Perdata Tk.I yang tidak mengajukan PK sebanyak 77 perkara

b. Putusan Pidana Tk.I yang tidak mengajukan PK sebanyak 319 perkara

- **Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi**
 - Perkara perdata yang berhasil dimediasi sebanyak 0 perkara

- **Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi**
 - Perkara anak yang berhasil melalui diversi sebanyak 0 perkara

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Selain didukung oleh Sumber Daya Manusia yang mempunyai integritas dan dedikasi tinggi serta kuantitas cukup, juga perlu ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan layak.

Selama ini sarana dan prasarana yang ada masih sangat terbatas dan kurang memadai, sehingga mutlak adanya peningkatan/penambahan guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas dengan baik, tertib, rapi dan nyaman yang pada akhirnya mampu mewujudkan suatu penyelesaian tugas dengan efektif dan efisien sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

1. Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	Minibus (Toyota Inova)		1			
2	Minibus (Toyota Kijang)				1	
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	Honda Megapro			2		
2	Suzuki Thunder			1		
3	Bebek Honda Supra X			2		
4	Suzuki				1	

Dalam DIPA Tahun 2017 tidak terdapat pengadaan Kendaraan roda 4 maupun kendaraan Roda 2, dan pada tahun 2017 tidak ada penghapusan terhadap kendaraan dinas baik kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2.

2. Rumah Dinas

No	Uraian	Jumlah	Kondisi	Keterangan
----	--------	--------	---------	------------

			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas					
1	Rumah Dinas Ketua	1			1	
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1			1	
3	Rumah Dinas Hakim	11			11	
4	Rumah Dinas Panitera	1			1	
5	Rumah Dinas Sekretaris	0				Tidak ada

Dalam DIPA Tahun 2017 tidak terdapat pengadaan Rumah Dinas, dan pada tahun 2017 tidak ada penghapusan terhadap Rumah-rumah Dinas.

3. Sarana dan Prasarana

No	Sarana / Prasarana	Jumlah	Keterangan
I	Sarana/Prasarana Gedung		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	2	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang	4	
7	Ruang Kepaniteraan	3	
8	Ruang Sub Bagian	3	
9	Ruang Panitera Pengganti	1	
10	Ruang Server	1	
11	Ruang Arsip	4	
12	Ruang Mediasi/Diversi	1	
13	Ruang Jaksa	1	
14	Ruang Tunggu Sidang	1	
15	Ruang Laktasi	1	
16	Ruang Posbakum	1	
17	Ruang Perpustakaan	1	
18	Ruang Media Center	1	

II	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	Server	2	
2	Komputer	45	
3	Laptop	10	
4	LCD Projector/Infocus	1	
5	Scanner	2	
6	PABX	3	
7	Mesin Fotocopy	1	
8	AC split	26	
9	Faximile	1	
10	Stationary Generating Set (Genset)	1	
11	Printer	25	
12	Router	1	
13	UPS	14	
14	Kipas Angin	14	
15	Lemari Besi	11	
16	Lemari kayu	58	
17	Rak Besi	4	
18	Rak kayu	37	
19	Filing Cabinet	39	
20	Brandkas	3	
21	CCTV	1	
22	Papan Visual	20	
23	Meja Kerja	81	
24	Kursi besi	82	
25	Kursi Kayu	84	
26	Sice	15	
27	Bangku Panjang Kayu	59	
28	Meja Resepsionis	2	
29	Televisi	2	
30	Sound System	1	

a. Dalam DIPA Tahun 2017 tidak ada penambahan ruang pada Gedung Kantor Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB.

- b. Dalam DIPA Tahun 2017 terdapat pengadaan computer dan Printer serta UPS untuk Server. Dan untuk tahun 2017 tidak ada penghapusan terhadap sarana/prasarana fasilitas perkantoran.

D. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan anggaran DIPA Tahun 2017 pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran Non Teknis :

DIPA Nomor : SP DIPA - 005.01.2.097741/2017 tanggal 07 Desember 2016

1.1 Belanja Pegawai

1.1.1 Pagu Anggaran	= Rp. 4.837.469.000
1.1.2 Realisasi Anggaran	= Rp. 4.968.601.416
1.1.3 Sisa anggaran	= Rp. 131.132.416 (minus)
1.1.4 Prosentase realisasi anggaran	= 102,75 %

1.2 Belanja Barang

1.2.1 Pagu Anggaran	= Rp. 794.914.000
1.2.2 Realisasi Anggaran	= Rp. 757.903.161
1.2.3 Sisa anggaran	= Rp. 37.010.839
1.2.4 Prosentase realisasi anggaran	= 99,65 %

1.3 Belanja Modal

1.3.1 Pagu Anggaran	= Rp. 381.250.000
1.3.2 Realisasi Anggaran	= Rp. 380.414.555
1.3.3 Sisa Anggaran	= Rp. 835.445
1.3.4 Prosentase Realisasi Anggaran	= 99,78 %

2. Realisasi Anggaran Teknis :

DIPA Nomor : SP DIPA – 005.03.2.099094/2017 tanggal 07 Desember 2016

2.1 Pagu Anggaran	= Rp. 71.340.000
2.2 Realisasi Anggaran	= Rp. 66.597.310
2.3 Sisa Anggaran	= Rp. 4.742.690
2.4 Prosentase Realisasi Anggaran	= 93,35 %

Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama tahun 2017 adalah:

➤ Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari DIPA 01 :

Estimasi sebesar	= Rp. 7.150.000
Realisasi penerimaan sebesar	= Rp. 16.860.073
Prosentase realisasi penerimaan	= 235,80 %

➤ Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari DIPA 03 :

Estimasi sebesar	= Rp. 13.940.000
Realisasi penerimaan sebesar	= Rp. 59.057.236
Prosentase realisasi penerimaan	= 423,65 %

E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP

- Publikasi Perkara (one day one publish)

Teknologi Informasi di era modern seperti saat ini sangatlah memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas Pengadilan Negeri sebagai Lembaga Pelayanan Publik di Bidang Hukum.

Dengan adanya Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, maka Dukungan Teknologi Informasi sangat diperlukan dalam lingkungan peradilan untuk memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat.

Keberadaan Aplikasi SIPP (Sistim Informasi Penelusuran Perkara) di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB sangat mendukung terutama peranannya dalam percepatan penanganan perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana dan publikasi jadwal persidangan maupun publikasi putusan perkara.

Dukungan Teknologi Informasi tidak hanya diperlukan untuk kepentingan pelayanan public, namun juga sangat diperlukan dalam peningkatan kinerja yaitu percepatan proses administrasi dalam lingkungan pengadilan disamping penanganan perkara. Hal ini diperkuat dengan adanya aplikasi administrasi mulai dari Aplikasi KOMDANAS, SIMPONI (Aplikasi yang berhubungan dengan Pajak), SAPK (Aplikasi yang berhubungan dengan Kepegawaian) sampai dengan aplikasi SIMAK BMN (Aplikasi yang berhubungan dengan Barang Milik Negara).

Perangkat Keras

Pengelolaan Tehnologi Informasi di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB didukung dengan sarana alat pengolah data berupa : 2 Server, 1 Router, 39 komputer, 10 Laptop, 22 printer, 2 Scanner, 1 PC Layar Sentuh dan sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan Ahli Madya Computer 1 orang.

1. Perangkat Lunak

Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB telah dilengkapi dengan program perangkat lunak berupa Software yang mendukung tata kerja di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB dan didukung aplikasi baik di Kepaniteraan maupun di Kesekretariatan sehingga mudah di publikasikan melalui Website Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB serta sebuah aplikasi berbasis *sms gateway* yang mempermudah Pejabat Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB dalam mengumumkan pengumuman penting seperti rapat bulanan dan rapat teknis, serta berfungsi untuk memudahkan pengunjung sidang untuk mengetahui informasi perkara mereka melalui *sms gateway*.

F. Regulasi Tahun 2017

1. Manajemen Perubahan

Reformasi Birokrasi dan Manajemen Perubahan merupakan dua konsep utama bagi penyelenggaraan pelayanan pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB. Kedua konsep ini merupakan konsep yang saling terkait satu sama lainnya dan bukanlah merupakan konsep yang relatif baru.

2. Perundang-undangan

Pengkajian Terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam rangka melakukan pemahaman terhadap perundang-undangan maka Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB telah melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, pengkajian tersebut dilakukan sebulan sekali yang diikuti seluruh pegawai. Output dari pengkajian yang telah dilakukan adalah pegawai dapat memahami dan mengerti mengenai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga segala tindakan dan perbuatan semua Pegawai Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB tetap berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Untuk penataan dan penguatan organisasi pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB berpedoman pada visi dan misinya yang kemudian diimplementasikan melalui program-program yang telah dibuat dan berpedoman pada

Standar Operasional Prosedur yang telah ada.

4. Penataan Tata Laksana

Salah satu upaya penataan tata laksana yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB di wujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi Standar Operasional Prosedur Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Untuk membangun sistim kerja yang baik dan berkinerja tinggi di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB telah menerapkan untuk setiap pegawai melakukan catatan harian kerja, yang nantinya akan menjadi bahan dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

6. Penguatan Akuntabilitas

Pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB telah melakukan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas manajemen kepaniteraan dengan dukungan Aplikasi SIPP maupun manajemen kesekretariatan dengan cara menggunakan dan menerapkan Aplikasi Kesekretariatan seperti SIADPA Plus, Simak BMN, SAIBA, SIKEP, SIMPEG, SIMARI dan lain-lain dalam pelaksanaannya.

7. Penguatan Pengawasan

Pengawasan Internal pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB telah dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang dikoordinir oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB. Hasil dari pengawasan setiap triwulan sekali di laporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB, selanjutnya akan dilakukan perbaikan-perbaikan yang dikoordinir oleh Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB bilamana ada yang perlu diperbaiki, selanjutnya hasil-hasil perbaikan tersebut dilaporkan kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 1586/DJU/SK/PS01/9/2016 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi Di Lingkungan Peradilan Umum maka Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB juga menyelenggarakan pelayanan meja informasi, dimana meja informasi membantu mempermudah para pencari keadilan dalam berurusan dengan Pengadilan, Petugas Meja Informasi dilengkapi seperangkat P.C dan telepon serta berada di tempat yang mudah dijangkau. Meja informasi berada di lobi kantor, dimana permohonan informasi bisa langsung, lewat telepon atau melalui formulir permohonan informasi yang ada di meja informasi.

BAB IV

PENGAWASAN

Upaya untuk melaksanakan pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB salah satunya adalah melalui diadakannya pertemuan/rapat bulanan setiap bulan dengan para hakim dan seluruh pegawai untuk mengevaluasi tugas masing-masing sesuai dengan tupoksinya dan hal-hal lain yang dianggap penting.

A. PENGAWASAN INTERNAL

Disamping itu untuk lebih mengintensifkan fungsi pengawasan telah disusun Hakim Pengawas Bidang dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Nomor : W12.U4/ 254/ Kp.07.01/ 012/ 2017, tanggal 4 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

No.	NAMA HAKIM	HAKIM PENGAWAS
1	2	3
1	EDDY SOEPRAYITNO S. PUTRA, S.H.,M.H.	KOORDINATOR PENGAWASAN INTERNAL
2	MOCH. ICHWANUDIN, S.H.,M.H.	HUMAS
3	DANANG UTARYO, S.H.,M.H.	KEPANITERAAN PERDATA DAN PELAPORAN SIPP
4	UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H.	KEPANITERAAN PIDANA
5	I GUSTI MADE JULIARTAWAN, S.H.,M.H.	KEPANITERAAN HUKUM
6	ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H.	UMUM DAN KEUANGAN
7	SETYANINGSIH, S.H.	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

8	RUDY SETYAWAN, S.H.	PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN
9	ELIN PUJIASTUTI, S.H.,M.H.	KEBERSIHAN LINGKUNGAN KANTOR DAN PERTAMANAN

Sesuai Buku I Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan, pembagian tugas Pengawasan Internal meliputi :

1. Ketua melakukan pengawasan internal mengenai:
 - a. Ketepatan waktu memulai persidangan.
 - b. Penyusunan court calendar.
 - c. Minutasi harus tepat waktu, terutama terhadap perkara yang diajukan banding dan dalam perkara pidana yang terdakwa berada dalam tahanan.
 - d. Nilai sita jaminan harus seimbang dengan nilai gugatan.
 - e. Dalam menentukan nilai harga lelang agar diperhatikan juga harga umum dan pendapat termohon lelang.
 - f. Tempat pelelangan dilaksanakan harus sama dengan tempat yang diumumkan dalam pengumuman lelang.
 - g. Melakukan pemeriksaan keuangan secara mendadak dan membuat berita acara penutupankas.
 - h. Mengevaluasi laporan periodik yang menyangkut kegiatan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirim laporan dan hasil evaluasi secara berkala kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
 - i. Mengevaluasi perbuatan dan kegiatan Wakil Ketua, Hakim, seluruh pejabat kepaniteraan dan pejabat struktural dan pegawai yang dibuat secara berjenjang.

2. Wakil Ketua melakukan pengawasan internal mengenai:

- a. Perbuatan dan tingkah laku pejabat peradilan termasuk kemampuan teknis administrasi dan realitasnya.
- b. Pengisian register perkara secara tertib dan terus-menerus.
- c. Penyampaian isi register oleh Panitera Muda Perdata/ Pidana kepada Panitera Muda Hukum sebagai bahan pembuatan laporan.
- d. Pembuatan laporan periodik oleh Panitera Muda Hukum.
- e. Pelaksanaan tugas Jurusita sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Pembukuan keuangan perkara dibuat secara tertib dan terus-menerus, sesuai dengan ketentuan yang berlaku (ICW dan peraturan pelaksanaannya).
- g. Setiap pengeluaran biaya untuk kepentingan pemanggilan para pihak, pemberitahuan putusan Hakim dan lain-lainnya, agar benar-benar sampai kepada yang berhak;
- h. Penyimpanan uang agar disimpan pada Bank Pemerintah dengan rekening yang terpisah antara keuangan perkara dan keuangan APBN.
- i. Penataan jam kerja yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tertib perkantoran.

3. Hakim melakukan pengawasan internal mengenai:

- a. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi perkara perdata/pidana dan eksekusi yang ditugaskan Pimpinan Pengadilan .
- a. Khusus dalam pelaksanaan putusan pidana, Hakim yang ditugaskan sebagai KIMWASMAT secara periodik mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan.

B. Evaluasi

Evaluasi Pengawasan internal dilaksanakan secara berkala melalui forum rapat rutin yang diadakan secara berkala setiap bulan. Rapat rutin ini terdiri dari rapat Teknis yang dihadiri oleh pejabat fungsional Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB sedangkan untuk rapat dinas dihadiri oleh seluruh pegawai Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB.

Untuk Tahun mendatang setiap bulan akan diberikan penghargaan kepada Panitera Pengganti yang aktif dalam menginput data perkaranya melalui aplikasi SIPP dan yang paling cepat dalam menyelesaikan perkara sampai tahap minutasi (minutasi satu hari setelah putusan dibacakan), hal ini diharapkan agar semakin memberi semangat kepada para Panitera Pengganti untuk semakin meningkatkan kinerjanya dalam menyelesaikan perkara (minutasi).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang dikemukakan dalam Laporan Tahunan ini dapat disimpulkan : Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang dikehendaki apabila didukung administrasi yang tertib dan teratur serta adanya Sumber Daya Manusia yang memadai dan didukung oleh Sarana dan Prasarana yang memadai pula.

B. Saran

Guna mendukung upaya Peningkatan Kinerja pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB di tahun mendatang :

1. Perlunya upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan terhadap Sumber Daya Manusia yang ada dengan memberikan program pelatihan dan pengembangan yang berkualitas secara berkelanjutan kepada personil Teknis dan Non Teknis agar dihasilkan tenaga yang terampil secara teknis dan organisatoris, profesional dalam bidangnya.
2. Perlu penambahan Tenaga/ Pegawai sebagai Operator Komputer dan Tenaga Administrasi.
3. Untuk mendapatkan perhatian terhadap kondisi Rumah Dinas Jabatan Ketua , Wakil Ketua, Hakim maupun Rumah Dinas untuk Panitera dan Sekretaris. Rumah Dinas Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB kondisinya rusak sehingga sangat mendesak sekali untuk diadakan rehab. Sedangkan Rumah Dinas Hakim dan Panitera 13 (tiga belas) unit kondisinya rusak berat dan banjir juga perlu direhab.
4. Dalam penyusunan RKA-KL tahun 2018 Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB masih membutuhkan:
 - Tersedianya anggaran untuk rehab rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua.
 - Tersedianya anggaran untuk rehab rumah dinas Hakim sebanyak 13 (tigabelas) unit.
 - Tersedianya anggaran untuk rehab pagar keliling rumah dinas
 - Tersedianya anggaran untuk pengadaan AC Split untuk penyejuk ruangan terutama ruang server 2 unit dan ruang-ruang sidang masing-masing 2 unit.

- Tersedianya anggaran untuk pengadaan computer, laptop dan Printer untuk menunjang administrasi perkara maupun administrasi kesekretariatan.
 - Tersedianya anggaran untuk meningkatkan bandwidth internet, hal ini dianggap perlu karena saat ini semua laporan berbasis IT dan online.
5. Dengan adanya Program dari Mahkamah Agung berupa Reformasi Birokrasi terutama mengenai keterbukaan publik dan pemenuhan pengiriman file kepegawaian maka dianggap perlu tersedianya anggaran untuk memenuhi beberapa Perangkat keras sebagai berikut:
- Scanner
Untuk mendukung kelancaran penguploadan file-file kepegawaian
 - Stavolt
Diperlukan untuk mengurangi resiko kerusakan Server karena sering terjadi arus pendek dan lampu mati.
 - Stabiliser
Diperlukan untuk menjaga kestabilan arus listrik yang diterima oleh Server.
 - Hotspot
Diperlukan untuk memperlancar pengoperasian SIPP, SIMPEG, KOMDANAS, dan Aplikasi lainnya.
 - AC Split
Diperlukan untuk menjaga suhu ruangan server agar tetap dingin.

Meskipun dengan sarana dan prasarana yang terbatas yang ada di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB, namun mulai semester II tahun 2017 Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB telah berhasil merubah peta SIPP yang semula warna kuning (tingkat penyelesaian perkara di bawah 90 %) menjadi warna hijau (tingkat penyelesaian perkara di atas 90 %). Hal ini tidak lepas dari semangat kerja yang ditanamkan seluruh jajaran pegawai Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB terutama Hakim dan Panitera Pengganti.

Demikian Laporan Tahunan Kegiatan Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB tahun 2017 yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat-NYA dalam Pembangunan di bidang hukum, sehingga dapat terwujud tegaknya supremasi hukum dan keadilan di Kota dan Kabupaten Pekalongan khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

